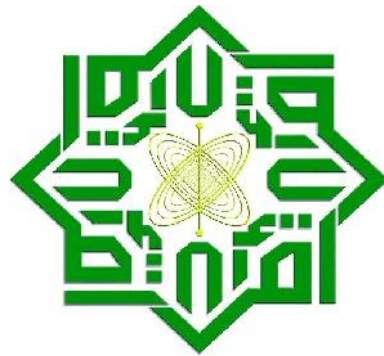


**SKRIPSI**

**PENGARUH KAPASITAS, KARAKTER DAN JAMINAN TERHADAP  
PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI DESA (UED) BINA  
USAHA BONCAH TERGENANG KABUPATEN ROKAN HULU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH**

**ABDUL GAVUR**

**NIM. 10571001732**

**JURUSAN MANAJEMEN S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2012**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH KAPASITAS, KARAKTER DAN JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI DESA (UED) BINA USAHA BONCAH TERGENANG KABUPATEN ROKAN HULU**

*Oleh:*

**ABDUL GAVUR**  
**NIM. 10571001732**

*Penelitian ini dilakukan UED-Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kapasitas, karakter dan jaminan baik secara simultan dan parsial terhadap pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa (UED) Bina Usaha Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini yaitu anggota yang mendapat kreditur dari UED Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah 71 orang dan sampel yang diambil sebanyak 42 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling atau secara acak. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan partial menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengaruh secara simultan yaitu kapasitas, karakter, dan jaminan terhadap pemberian kredit sebesar 94,80% dan sisanya 5,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Pengaruh secara simultan adalah signifikan yang dibuktikan dengan uji  $f$  hitung sebesar 233,236 dimana  $\text{sig } 0,00 < 0,05$ . kemudian pengaruh secara parsial yaitu kapasitas sebesar 97,20% adalah signifikan dengan uji  $t$  hitung 10,200 dimana  $\text{sig } 0,00 < 0,05$ . Karakter sebesar 11,40% adalah signifikan dengan uji  $t$  hitung 2,872 dimana  $\text{sig } 0,007 < 0,05$  sedangkan pengaruh jaminan sebesar 12,50% adalah tidak signifikan dengan uji  $t$  hitung dimana  $\text{sig } 0,226 > 0,05$ .*

*Kata Kunci : Kapasitas, Karakter, Jaminan, dan Pemberian Kredit*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas selesainya tugas ilmiah ini dalam bentuk penulisan skripsi. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena merupakan teladan umat yang patut kita contohkan yang telah mengadakan amar ma'ruf nahi munkar di permukaan bumi ini.

Penulis menyadari tanpa adanya ridho dari Allah SWT, saya tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Pengaruh Kapasitas, Karakter Dan Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa (UED) Bina Usaha Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu”** Untuk itu saya mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan keterampilan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan serta arahan dari berbagai pihak skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda ku tersayang yang dengan tulus ikhlas telah memberikan do'a dan pengorbanan baik material maupun motivasi kepada penulis.
2. Buat Adikku Jufri dan Sukri yang telah memberikan abang doa dan semangatnya buat abang.
3. Bapak DR. Mahendra Romus,SP,M.Ec, selaku Dekan dan juga Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tiada suatu yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih dan balas jasa sepantasnya, selain berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah atas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata segala kritik dan saran untuk penyempurnaan penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2012

**ABDUL GAVUR**  
**NIM. 10571001732**

## DAFTAR ISI

ABSTRAKS .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	4
I.3. Tujuan Penelitian .....	5
I.4. Manfaat Penelitian.....	5
I.5. Sistematika Penulisan.....	5

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

II.1. Pengertian Kredit .....	7
II.1.1. Tujuan dan Fungsi Kredit .....	9
II.1.2. Unsur-unsur Kredit .....	11
II.1.3. Jenis-jenis kredit .....	13
II.1.4. Jaminan Kredit .....	15
II.1.2. Prosedur dan Persyaratan Kredit.....	16
II.2.1. Analisis Pemberian Kredit.....	20
II.2.2. Kredit Bermasalah .....	23
II.3.3. Faktor-Penyebab Kredit Bermasalah.....	25
II.4.4. Kebijakan Perkreditan .....	28
II.3. Kerangka Berfikir .....	39

II.4.Hipotesis .....	31
II.5. Variable Penelitian.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
III.1.Lokasi Penelitian .....	33
III.2. Jenis dan SumberData .....	33
III.3.Populasi dan Sampel.....	33
III.4. Teknik Pengumpulan Data .....	34
III.5. Pengolahan Data .....	35
III.6. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM UED</b>	
IV.1.Sejarah Singkat UED.....	38
IV.2.Kelembagaan UED-SP .....	41
IV.3. Jenis usaha (Dana UED-SP).....	41
IV.4. Tujuan Pembentukan pengelola UED-SP .....	42
IV.5.Pembinaan dan Penendalian .....	43
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
V.1.Deskripsi Variabel .....	48
V.1.1.Aspek Kapasitas (X1) .....	48
V.1.2. Aspek Karakter (X2) .....	49
V.1.3. Aspek Jaminan (X3) .....	50
V.1.4. Pemberian Kredit(Y) .....	51
V.2.Uji Kualitas Data .....	52
V.2.1.Aspek Kapasitas .....	52
V.2.2.Aspek Karakteristik .....	53

V.2.3. Aspek Jaminan.....	54
V.2.4. Pemberian Kredit.....	54
V.3. Uji Normalitas .....	55
V.4. Asumsi Klasik.....	56
V.4.1. Uji Autokorelasi .....	56
V.4.2. Uji Heteroskedastisitas .....	57
V.4.3. Uji Multikolinieritas .....	58
V.5. Analisis Regresi.....	59
V.5.1. Pengaruh Secara Simultan .....	60
V.5.2. Pengaruh Secara Parsial.....	60

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

VI.1. Kesimpulan.....	62
VI.2. Saran-saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **II.1. Pengertian Kredit**

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa romawi yaitu *Credere* yang artinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan uang kepada pihak nasabah (debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian kredit yang diatur dalam pasal 11 angka 11 UU perbankan disebut sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Supramono, 2009 : 152)

Kredit berasal dari bahasa italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet (Hasibuan, 2005 : 87)

Kredit merupakan pinjaman yang diajukan untuk membeli sesuatu dan peminjam melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Natar, 2008:10)

Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada



nasabahnya. Terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus bank devisa. Oleoperasionalnya. Pada akhirnya, pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana disyaratkan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Kredit dilihat dari bahasa berarti percaya, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat kredit dari bank, orang atau badan tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Menurut O.P Simorangkir (1988), kredit adalah “pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu yang mendatang” (Naja, 2005 : 123)

Molenaar (Dalam buku “kredoet” tjeenk willink zolle h 5 1878) yang dikutip prof. Dr.Mariam Darus Badruzaman, SH dalam buku aneka hukum bisnis hal. 138) mengemukakan bahwa kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan dikemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.

Kemudian defenisi tersebut dikembangkan bahwa jenis kredit mencakup: (Sutarno, 2005 : 95)

1. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang.
2. kredit berupa uang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.
3. kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang
4. kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima kredit merupakan

penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.  
(Kasmir, 2011 : 97)

Sebelum kredit di berikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup:

- a. Latar belakang nasabah atau perusahaan
- b. Prospek usahanya
- c. Jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya

Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

### **II.1.1. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit oleh pihak bank mempunyai tujuan dan beberapa fungsi, yaitu: (Kasmir, 2002 : 105)

- a. Tujuan Kredit
  1. Mencari keuntungan. Keuntungan sangat penting untuk kelangsungan bank. Disamping itu, juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan di likuidir (dibubarkan)
  2. Membantu usaha nasabah
  3. Membantu pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
- b. Fungsi Kredit
  1. Untuk meningkatnya guna daya guna uang
  2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
  3. Untuk meningkatkan daya guna barang

4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Fungsi kredit bagi masyarakat antara lain dapat: (Hasibuan, 2005 : 88)

1. Menjadi motivator dan dinamisor peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang.
4. Meningkatkan hubungan internasional.
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
6. Meningkatkan daya guna (utility) barang.
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Memperbesar modal kerja perusahaan.
9. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat.
10. Mengubah cara berpikir / bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Sedangkan tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.

## 7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Agar pemberian kredit oleh bank dapat mencapai sasaran, dalam arti kredit dapat membantu pemohon kredit sesuai dengan kebutuhannya. Disamping itu juga menguntungkan bagi bank dalam arti sesuai dengan tujuan bank yang meliputi dua fungsi pokok, yaitu profitability (bank memperoleh keuntungan dari kredit tersebut) dan safety (kredit yang diberikan benar-benar terjamin). (juminagan, 2008, 236).

### II.1.2. Unsur- unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberi suatu fasilitas adalah sebagai:  
(Kasmir, 2001 : 74)

#### a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima di masa datang.

#### b. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit ini dituangkan dalam suatu perjanjian (Aqad kredit), di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

#### c. Jangka waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

#### d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan 2 hal, yaitu:

- Resiko kerugian yang di akibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnyapada hal mampu, dan

- Resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah nama bunga tidak sengaja, yaitu akibat terjadi musibah.

e. Balas jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut, kita kenal dengan bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

Sedangkan dalam buku manajemen perkreditan bank umum, mengatakan bahwa; Pada dasarnya kredit itu mengandung unsure-unsur sebagai berikut: (Rahmat dan Maya, 2004 : 3)

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain.
2. Adanya pihak yang membutuhkan / meminjam uang, barang atau jasa.
3. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsure perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari berbagai macam-macam sumber, termasuk dalam nya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

### II.1.3. Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut: (kasmir, 2011 : 103)

1. Dilihat dri segi kegunaan

a) Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu perioide yang relative lebih lama.

b) Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan akan menghasilkan bahan tambang atau kredit industry lainnya.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh untuk kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama dan biasanya digunakan untuk modal kerja

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

4. Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian rakyat.

b) Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek seperti ayam dan jangka panjang seperti kambing.

c) Kredit industri

Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.

d) Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang.

e) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan sarana dan prasarana pendidikan.

f) Kredit profesi

Diberikan kepada profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h) Dan sektor-sektor lainnya.

#### **II.1.4. Jaminan Kredit**

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan.



Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan

a) Jaminan benda berwujud.

Yaitu barang-barang yang dapat dijadikan seperti:

Tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.

b) Jaminan benda tidak berwujud.

Yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:

Sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, deposito, rekening tabungan, yang dibekukan, promes, wesel dan surat tagihan lainnya.

c) Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

## **II.2. Prosedur dan Persyaratan Kredit**

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan (**Zainul 2002 : 238**). Dalam pemberian kredit kepada nasabah, harus berdasarkan penilaian yang tepat dan pada waktu penyelesaian pengembalian kredit tidak

terjadi hal-hal yang mendatangkan kerugian kepada pihak yang member kredit. Yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan tidak terbayarnya kredit yang diberikan. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko tertentu, untuk menghindari resiko yang kemungkinan terjadi maka permohonan kredit harus dinilai sesuai dengan dasar prosedur dan persyaratan pemberian kredit. Pendekatan krakter merupakan pendekatan terpenting menilai kelayakan pengajuan calon nasabah. Apabila penilaian layak maka akan dilakukan pendekatan *saving power* untuk menentukan plafon yang diberikan.

Dalam menerapkan sistem-sistem yang menjadi keunggulan perlu adanya promosi sehingga dapat menarik konsumen, ini dapat dilakukan sehingga nasabah menjadi tertarik. Dalam perkreditan perlu juga menerapkan strategi promosi yang dapat dilakukan antara lain dengan prosedur dan persyaratan yang fleksibel sehingga bias bersaing. Orientasi pelayanan pada nasabah mencerminkan keunggulan bersaing, adanya pelayanan yang diberikan dengan baik memberikan kepercayaan dimana pelayanan tersebut mengutamakan kepentingan nasabah sehingga meningkat kepercayaan nasabah.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: **(kasmir, 2011 : 115)**

#### 1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta.
- Maksud dan tujuan

Apakah memperbesar omset perusahaan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru.

- Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.

- Cara pemohon mengembalikan kredit

jelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lain.

- Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

Akte notaries, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), neraca laba- rugi tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, foto kopy sertifikat jaminan.

## 2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

## 3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

## 4. *On the Spot*

Merupakan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau sebagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* di cocokkan dengan wawancara 1.

#### 5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan –kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

#### 6. Keputusan kredit

Dalam hal ini adalah menentuka apakah kredit di terima atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

- Jumlah uang yang di terima.
- Jangka waktu kredit.
- Dan biaya-biaya yang harus di bayar.

#### 7. Penandatanganan akad kredit

Merupakan kelanjutan diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

Penandatanganan dilaksanakan:

- Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- Dengan melalui notaris.

#### 8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran / penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- Sekaligus atau
- Secara bertahap.

### **II.2.1. Analisis Pemberian Kredit**

Adapun analisis pemberian kredit ini dilakukan yaitu analisis terhadap calon para peminjam untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut.

Adapun tujuan analisis kredit ini adalah untuk meyakinkan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti dana tersebut dapat kembali, analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Dalam analisis pemberian kredit perlu hal-hal seperti kepercayaan dimana pihak bank harus dapat mempercayai calon-calon penerima kredit. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar pemberian kredit.

Prinsip dasar dalam pemberian kredit dikenal dengan 6 C yang meliputi sebagai berikut: (**Lukman , 2005 :88**)

#### *1) Character*

Dalam melakukan analisis mengenai watak / karakter berkaitan dengan integritas calon debitur. Integritas ini sangat menentukan willingness to pay atau kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Penilaian terhadap ititikad atau kemauan baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon nasabah yang baru dikenal oleh bank.

## 2) *Capital*

Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dan debitur. Oleh karena itu, pihak calon debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya.

## 3) *Capacity*

Capacity adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman disertai bunga sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan.

Kemampuan-kemampuan nasabah yang harus diukur adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan (calon) nasabah dalam menyediakan dana untuk pembiayaan.
- b. Kemampuan (calon) nasabah untuk membangun proyeknya.
- c. Kemampuan nasabah untuk menghasilkan produk dari proyeknya.
- d. Kemampuan nasabah untuk menjual hasil produksinya.
- e. Kemampuan nasabah untuk memperoleh laba dari penjualan tersebut.
- f. Kemampuan nasabah untuk menyediakan cash yang memadai untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank.

Dengan demikian hal-hal yang dianalisis adalah hal sebagai berikut:

- a. Jadwal pembangunan proyek yang akan dibiayai bank dan nasabah.
- b. Rencana produksi dan penjualan (produk maupun jasa).
- c. Proyeksi laba / rugi misalnya selama lima tahun atau selama jangka waktu kredit.
- d. Kemampuan manajerial dari pimpinan perusahaan dalam mengelola bisnisnya kelak.

- e. Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada pihak-pihak lain.

#### 4) *Condition of economi*

Dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula ikut dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu kredit). Kondisi-kondisi tersebut antara lain meliputi:

- a. Kondisidari sector industry dimana proyek akan dibangun
- b. Ketergantungan terhadap bahan baku yang harus di impor
- c. Nilai kurs valuta terhadap nilai uang domestic (rupiah).
- d. Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.
- e. Kondisi perekonomian secara nasional, regional dan global.
- f. Kemudahan untuk memperoleh sumberdaya (bahan baku, tenaga kerja)
- g. Tingkat bunga kredit yang berlaku.

#### 5) *Collateral*

Collateral atau agunan kredit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan. Collateral ini umumnya adalah barang-barang yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterimanya.

#### 6) *Constraints*

*Contrain* merupakan factor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan analisis kredit berdasarkan prinsip “6A” adalah:

1. Analisis aspek *yuridis* (hukum)

Analisis ini bertujuan meneliti ketentuan-ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank.

2. Analisis aspek pasar dan pemasaran

Analisis ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank serta meneliti pemasaran apa yang digunakan oleh investor atau pengelola proyek.

3. Analisis aspek teknis

Analisis aspek ini bertujuan untuk meneliti seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek serta kesiapannya dalam operasinya.

4. Analisis aspek manajemen

Analisis aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan.

5. Analisis aspek keuangan

Analisis aspek ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan dalam bidang keuangan.

6. Analisis aspek sosial-ekonomi

Analisis aspek ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit bank memiliki value added yang tinggi dinilai dari pandangan sosial maupun makro ekonomis.

### **II.2.2. Kredit Bermasalah**

Secara luas kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai



pembayaran bunga mengenai bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya (Mahmoedin, 2002 : 3)

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu: (Riva'i dan Andria, 2006, 476)

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
4. Kredit yang mana dalam pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai / memenuhi target yang diinginkan bank.
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah-nasabah yang bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menungga.

Bagi bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah, semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

### **II.2.3. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

Banyak faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu: (**Mahmoedin, 2002 : 51**)

#### 1. Faktor internal perbankan

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dari bank itu sendiri seperti:

##### a. Kelemahan dalam analisis kredit

Setiap analisis harus berdasarkan data yang benar-benar akurat, agar hasil analisis menjadi tepat.

##### b. Kelemahan dalam dokumen kredit

Salah satu kekuatan bank dalam menghadapi kenakalan nasabahnya, adalah kekuatan dan kelengkapan dokumen yang biasa digunakan sebagai senjata bank.

##### c. Kelemahan dalam supervise kredit

Setiap usaha tentu ada resiko bisnis dan resiko non bisnis. Karena itu bank harus tahu persis setiap perkembangan usaha nasabahnya. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan baik secara periodik maupun insidental dan secara kontinyu agar setiap masalah dapat ditanggulangi secara disiplin.

##### d. Kelemahan kebijakan kredit

Setiap bank mempunyai kebijakan kredit yang sudah digariskan terlebih dahulu. Seperti masalah system, prosedur dan wewenang yang diberikan kepada pejabat bank.

Kebijakan kredit ini bisa saja mengandung kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaan juga menimbulkan kelemahan.

e. Kelemahan bidang agunan

Mungkin secara hukum setiap agunan telah diikat dengan baik dan kuat. Namun harus diingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik ada yang mudah berpindah tangan atau rawan kerusakan. Sehingga petugas pemeriksaan hendaknya melakukan pemantauan dengan pengawasan secara rutin dan insidental terhadap barang jaminan.

f. Kesalahan sumber daya manusia

Sebagaimana tenaga untuk *kredit recovery* maka penyelamatan dan penyelesaian bukanlah pekerjaan yang mudah seperti melakukan analisis kredit biasa, diperlukan tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian kredit.

g. Kelemahan teknologi

Ketidak mampuan bank secara teknis dapat dalam berbagai bentuk antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan tenaga secara kuantitatif, keterbatasan kemampuan petugas secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis seperti computer dan software.

2. Faktor internal nasabah

Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

a. Kelemahan karakter nasabah.

b. Kelemahan kemampuan nasabah.

- c. Musibah yang dialami nasabah.
- d. Kecerobohan nasabah.
- e. Kelemahan manajemen nasabah.

### 3. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah fakto-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen, seperti:

- a. Situasi ekonomi yang negatif dalam negeri yang merugikan.
- b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan.
- c. Politik Negara lain yang merugikan.
- d. Situasi alam yang merugikan.
- e. Peraturan pemerintah yang merugikan.

### 4. Faktor kegagalan bisnis

Dalam analisis permohonan kredit, petugas kredit melakukan identifikasi resiko yang mungkin timbul. Analisis kredit didasarkan pada kecermatan atas kemampuan meminimalkan resiko, namun harus disadari bahwa resiko tersebut tidak mungkin hilang 100%. Kegagalan bisnis senantiasa muncul diluar kemampuan berbagai pihak.

#### a. Aspek hubungan (*human relation*)

Aspek hubungan antara nasabah dengan pihak ketiga diperlukan guna menjamin kelangsungan usaha nasabah.

#### b. Aspek yuridis

#### c. Aspek manajemen

Kekuatan manajemen perusahaan nasabah dilihat berdasarkan keberadaan tenaga profesional yang dimilikinya.

#### d. Aspek pemasaran

Tinggnya produktivitas perusahaan namun tidak didukung oleh kemampuan memasarkan hasil produksi, akan menimbulkan gangguan terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit kepada bank.

- e. Aspek teknis produksi
- f. Aspek keuangan
- g. Aspek sosial ekonomi.

#### **II.2.4. Kebijakan Perkreditan**

Sasaran kebijakan umum perkreditan bank sebagai berikut: **(Sawaldjo, 2004 :140)**

1. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan pengendalian resiko dengan cara menerapkan prinsip perkreditan yang sehat.
2. Untuk merumuskan kebijakan perkreditan bank dan sebagai pedoman umum yang melandasi pedoman pelaksanaan kredit dan prosedur kredit tertentu yang bersifat khusus, yang dapat diterapkan bukan saja pada semua kegiatan bisnis tetapi dapat juga diterapkan pada kegiatan penunjang disemua jajaran manajemen perkreditan.
3. Untuk lebih meningkatkan disiplin dari semua pejabat bank terhadap aturan main dalam perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
4. Untuk membentuk disiplin pelayanan kredit yang tertip dengan cara dan sikap yang sama bagi semua unit perkreditan bank diseluruh Indonesia.

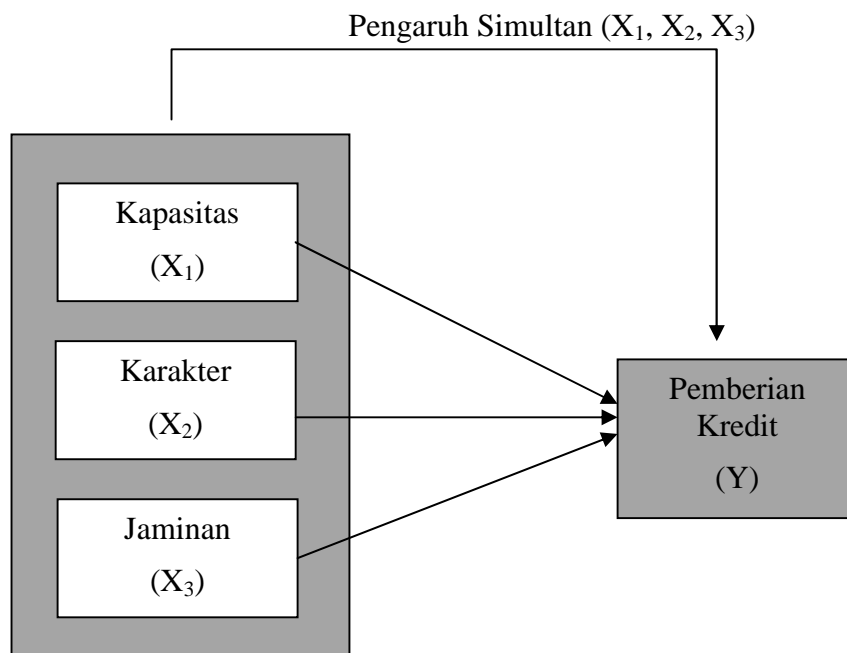
Sedangkan kebijaksanaan penjualan kredit adalah merupakan pedoman yang ditempuh oleh perusahaan dalam menentukan apakah kepada seorang langganan akan diberikan kredit dan kalau diberikan berapa banyak atau berapa jumlah kredit yang akan diberikan tersebut (Lukman, 2007 : 256)

Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara tertulis ataupun yang tidak tertulis sebelum pelaksanaan perkreditan itu sendiri berlangsung. rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijaksanaan kredit (*kredit policy*). Karena kebijakan/*policy* ini akan merupakan pedoman kerja dibidang perkreditan maka kebijaksanaan tersebut harus mengandung keputusan-keputusan politis, keputusan-keputusan yang bersifat teknis operasional.

### **II.3. Kerangka Befikir**

Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah, harus berdasarkan penilaian yang tepat dan padawaktupenyelesaian pengembalian kredit tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kerugian kepada pihak yang member kredit. Yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan tidak terbayarnya kredit yang diberikan. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko tertentu, untuk menghindari resiko yang kemungkinan terjadi maka permohonan kredit harus dinilai sesuai dengan dasar prosedur dan persyaratan pemberian kredit. Pendekatan krakter merupakan pendekatan terpenting menilai kelayakan pengajuan calon nasabah. Apabila penilaian layak maka akan dilakukan pendekatan *saving power* untuk menentukan plafon yang diberikan. (Widyaningrum, 2002 : 69). Selanjutnya prinsip dasar dalam pemberian kredit dikenal dengan diantaranya dalam penelitian ini yaitu ; pendapatan, karakter dan jaminan (Lukman , 2005 :88).

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Berfikir**



#### **II.4. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian Farid (2007) variabel pendapatan, karakter dan jaminan, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,010 (pendapatan), 0,039 (karakter) dan 0,015 (jaminan) dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari hasil uji juga menunjukkan bahwa pendapatan merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap pemberian kredit. Hasil uji F, variabel pendapatan, karakter dan jaminan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit kendaraan bermotor, dengan koefisien determinasi sebesar 60,8%. Aris (2000), dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan laporan Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja”, menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki peranan, dalam hal ini laporan keuangan tidak berperan secara mutlak, melainkan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi didalam penentuan suatu permohonan kredit tersebut

diterima/ditolak. Faktor-faktor lain tersebut dapat berupa faktor jaminan, faktor 5 “C”, dan sebagainya. Eni (2000), dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Laporan Keuangan Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit”, menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja.

Selanjutnya, Fauziah (2001), dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Peranan Laporan Keuangan Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja”, menyebutkan bahwa laporan keuangan tidak memiliki peranan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja, karena nasabah lebih mempertimbangkan pada aspek lain seperti prospek usaha dimasa yang akan datang dan jaminan. Dwi (2001), dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Laporan Keuangan Calon Debitur Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja”, mengungkapkan bahwa laporan keuangan sangatlah berperan penting dalam pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja. Yusuf (2002), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja”, yang menyebutkan bahwa dalam pemberian kredit modal kerja, laporan keuangan memiliki peranan. Dalam hal ini laporan keuangan tidak berperan secara mutlak, melainkan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi didalam penentuan suatu permohonan kredit tersebut diterima/ditolak. Faktor-faktor lain tersebut dapat berupa faktor jaminan, faktor 5 “C”, dan sebagainya.

## **II.5. Hipotesis**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dibuat sebuah hipotesis penelitian sebagai berikut:



1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan kapasitas, karakter, dan jaminan secara simultan terhadap pemberian kredit pada UED Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu.
2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan kapasitas, karakter, dan jaminan secara partial terhadap pemberian kredit pada UED Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu.

## **II.6.Variable Penelitian**

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan maka variabel penelitian ini terdiri dari yaitu :

1. Kapasitas (X1)
2. Karakter (X2)
3. Jaminan (X3)

Pemberian Kredit (Y)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1.Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil Objek penelitian pada UED-Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu.

#### **III.2.Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Tanggapan masyarakat, pengusaha sebagai debitur dalam hal penyaluran kredit bagai mana faktor internal perbankan, faktor internal nasabah, faktor kegagalan bisnis.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari UED Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu yang berbentuk data tertulis yang tercermin dalam sejarah perusahaan, aktivitas UED, laporan keuangan dan laporan tahunan perkembangan penyaluran kredit UED.

#### **III.3.Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu anggota yang mendapat pinjaman dari UED Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 71 orang dan sampel yang diambil sebanyak 42 orang menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling atau secara acak.

Jumlah ini di dapat dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat nilai kritis sebesar 10%

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{71}{1 + 71(10\%)^2}$$

$$n = \frac{71}{1 + 0,71}$$

$$n = 41,52 \text{ dibulatkan } 42 \text{ orang}$$

Dimana  $n$  = Ukuran Sampel

$N$  = Ukuran Populasi

$e$  = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%.

#### III.4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pimpinan dan karyawan UED dan responden yang berkaitan.
- b. Quesioner yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membuat daftar pertanyaan kepada responnden.

### III.5. Pengolahan Data

Metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert digunakan untuk mengukur tanggapan atau respons seseorang tentang persepsi. Skala Likert dimana peneliti akan memberi bobot pada setiap jawaban dari pernyataan-pernyataan yang tersedia dan skor yang diberikan pada jawaban sering dijumlahkan. Setiap jawaban responden dinilai dengan arah pertanyaan sebagai berikut: untuk pernyataan positif, skala nilai yang digunakan adalah 5-4-3-2-1.

**Tabel 3.1**  
**Skala Pembobotan Alternative Jawaban Kuesioner**

No	Alternative Jawaban	Bobot
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Untuk memberikan gambaran tentang skor perolehan berdasarkan bobot yang telah ditetapkan. Adapun skor merupakan jumlah dari setiap bobot item pernyataan dengan upama jumlah responden 30 orang.

**Tabel 3.2. : Contoh Tanggapan Responden Mengenai Variabel Penelitian Berdasarkan Item Pertanyaan**

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Skor
1	Item 1	15	15	0	0	0	135
2	Item 2	8	21	1	0	0	127
10	Item 10						105

Untuk menentukan skor pada setiap indikator yaitu perkalian setiap bobot dengan jumlah responden yang menjawab pada kategorinya, misalkan pada item-1 yaitu  $(5 \times 15) + (4 \times 15) + (3 \times 0) + (2 \times 0) + (1 \times 0) = 135$ .

### III.6. Analisis Data

Untuk menganalisa data yakni digunakan dengan metode deskriptif yaitu penganalisaan yang bersipat menjelaskan atau menguraikan dimana selanjutnya diambil beberapa kesimpulan sebagai jalan untuk memecahkan persoalan. Dalam penganalisaan data dan informasi yang didapat ditabulasikan dan dihubungkan dengan teori yang dapat mendukung pembahasan analisis ini serta sebagai masalah dan upaya pemecahannya dilakukan dengan kurun waktu tertentu.

Untuk mengetahui pengaruh secara simultan yaitu besarnya kontribusi variabel  $X_1$ , dan  $X_2$  terhadap variasi  $Y$  digunakan uji Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ ). Nilai  $R^2$  ini mempunyai range 0 (nol) sampai 1. Semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin baik hasil regresi tersebut dan semakin besar mendekati 0 (nol) maka variabel secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel terikat.

Selanjutnya pengaruh secara partial dengan menggunakan analisis regresi yang dapat diperoleh dengan menggunakan Program SPSS, adapun rumus regresi linear berganda adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Dimana :  $Y$  = Pemberian Kredit

$a$  = Konstanta

$b_1, b_2,$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Kapasitas

$X_2$  = Karakter

$X_3 = \text{Jaminan}$

Untuk mengetahui pengaruh apakah signifikan secara partial yaitu dengan cara membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikan 0,05. jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM UED**

#### **IV.1. Sejarah singkat UED-SP**

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional serta dalam keputusan gubernur Riau Nomor 592/IX/2004.

Visi PPD adalah mewujudkan masyarakat Riau yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi Riau 2020.

Adapun misi PPD adalah:

- a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha desa/kelurahan.
- b. Memperkuat kelembagaan masyarakat.
- c. Mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif
- d. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa/kelurahan

Sedangkan tujuan program pembayaran desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha/kelurahan menuju kemandirian desa.

Program pemberdayaan desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah provinsi riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk: penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, penyediaan bantuan permodalan yang berpihak kepada masyarakat miskin, penggugatan peran aparat pemerintah desa/kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk penguatan kelembagaan masyarakat masyarakat desa/kelurahan, mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa/kelurahan, pembangunan desa/kelurahan secara terencana dan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelompok dan anggota dan anggota usaha kecil menengah.

Strategi yang dilakukan pada program pemberdayaan desa(PPD)

Dalam mewujudkan visi dan misi program maka strategi yang digunakan adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat
- c. Pengembangan ekonomi masyarakat.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam mendukung strategi tersebut adalah:

- a. Pemihakan kepada kelompok masyarakat miskin dan marjinal
- b. Otonomi dan desentralisa, dimana masyarakat mendapatkan kesempatan, kepercayaan dan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemanfaatan serta pelestarian dan pengembangannya,
- c. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan
- d. Mendorong pengembangan potensi dan sumber daya local seoptimal mungkin



- e. Keterpaduan pelaksanaan kegiatan, memiliki sinergi yang kuat dengan kegiatan yang lain dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan program maka dalam pelaksanaannya arus sejalan dengan prinsip-prinsip dibawah dibawah ini:

- a. Keberpihakan kepada orang miskin

Setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan, harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-sebesarannya bagi kelompok orang miskin (bermanfaat lebih banyak bagi kelompok orang miskin)

- b. Transparansi

Seluruh operasional kegiatan PPD harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat

Dengan keterbukaan memudahkan masyarakat dalam:

Memperoleh informasi secara lengkap dan terus-menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut PPD, menumbuh kembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPD, meningkatkan saling percaya diantara sesama pelaku PPD.

- c. Partisipasi

Adanya keterlibatan masyarakat secara aktif terutama kelompok miskin dalam setiap tahap kegiatan PPD, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan

- d. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-hak yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

#### **IV.2. Kelembagaan UED-SP**

Untuk pelaksanaan kegiatan Modal Usaha Desa dibentuk kelembagaan khusus yang disebut dengan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED –SP). Pembentukan pengelola UED-SP dilakukan dengan forum musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan difasilitasi oleh pendamping desa bersama kader pembangunan masyarakat, selanjutnya pengelola UED-SP harus mendapatkan pengesahan dari Bupati.

- a. Pengelola UED-SP terdiri dari warga masyarakat desa yang berdomisili tetap didesa bersangkutan dan dapat dipercaya dan tingkat pendidikan minimal SLTA serta dipilih dalam forum musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat desa.
- b. UED-SP dikelola oleh 4 orang pengelola yang terdiri dari ketua, Tata usaha, kasir, Staf analisa kredit serta dalam perkembangannya dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- c. Aparatur Desa, Ketua dan anggota BPD tidak dapat dipilih sebagai pengelola UED-SP.

#### **IV.3. Jenis usaha (Dana UED-SP)**

1. Perdagangan (D)
2. Pertanian (T)
3. Perkebunan (P)
4. Industri kecil (Ik)
5. Jasa (J)

Berdasarkan data diatas dapat kita simpulkan betapa besarnya roda perekonomian masyarakat khususnya di Desa Boncah Tergenang. Peran ini akan terus meningkat seiring dengan perkembangan UED –SP Satahi hingga pada akhirnya dapat menjadi lokomotif perkembangan ekonomi serta pertumbuhan usaha di Desa Boncah Tergenang khususnya dan kabupaten rokan hulu umumnya.

Jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola hingga saat ini sebatas simpan pinjam. Hal ini tidak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan baik secara administrasian maupun secara keorganisasian serta tujuan didirikannya UED-SP yakni sebagai sarana sumber permodalan usaha bagi masyarakat di desa khususnya bagi masyarakat.

Setiap kegiatan UED-SP Satahi selalu melibatkan dan mengikut sertakan masyarakat atau paling tidak perwakilan dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat desa hal ini dilakukan agar semua bentuk kebijakan yang diambil nantinya sesuai dengan yang diinginkan dan harapan masyarakat.

#### **IV.4.Tujuan pembentukan pengelola UED-SP**

Mengelola dana usaha desa secara professional, transparan dan bertanggung jawab, mengelola kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat desa, membantu pemerintah desa dan LPM mencairkan alternatif pemecahan, membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan dan mengembangkan usaha ekonomi desa sebagai asset bagi masyarakat desa yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

#### **IV.5.Pembinaan dan pengendalian**

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelola kegiatan program pemberdayaan desa, maka perlu melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing instansi secara terpadu. Acuan yang dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PPD oleh tim koordinasi adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan Pusat Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Pengaturan Tata Usaha Keuangan Daerah
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- f. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001, Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
- g. Se Mendagri Nomor 419/29/18/SJ, Tanggal 29 Oktober 2004, Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Dengan Transparansi dan Akuntabilitas Publik
- h. Keputusan Gubernur Nomor 592/IX/2004, Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Riau.

Maksud dan tujuan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan Desa kelurahan adalah:

- a. Memotivasi dan memfasilitasi masyarakat agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan PPD sesuai dengan prinsip-prinsip, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

- b. Memantau dan mengendalikan agar pelaksanaan PPD tidak menyimpang dari prinsip-prinsip, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.
- c. Mengkoordinasikan upaya-upaya pemecahan masalah dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan PPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan proses dan hasil-hasil pelaksanaan PPD kepada pihak-pihak yang dipandang perlu, termasuk DPRD, LSM, Dunia Usaha dan sebagainya
- e. Membina dan mengendalikan tenaga pendamping agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peran, fungsi dan kewajiban.

Pembinaan dan pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari:

- a. Tingkat Desa/ kelurahan

Kepala desa/ kelurahan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kegiatan masyarakat pada desa atau kelurahan masing-masing.

Untuk kepentingan pembinaan dan pengendalian di tingkat desa/kelurahan maka ditetapkan sebagai pihak yang melakukan fungsi pengawasan umum yaitu ketua BPD (Untuk Desa) dan satu orang tokoh masyarakat yang dipilih dalam musyawarah kelurahan (untuk kelurahan) yang ditetapkan melalui SK Bupati.

- b. Tingkat Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan kegiatan di setiap desa, terutama untuk kegiatan bidang sektoral demi menjadi terlaksananya sistem perencanaan pembangunan partisipatif serta memastikan seluruh pelaku-pelaku kegiatan PPD menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.

c. Tingkatan Kabupaten

Bupati/wali kota adalah penanggung jawab kegiatan dibentuk Tim koordinasi pembinaan pengendalian PPD tingkat kabupaten melalui SK Bupati/wali kota. Adapun struktur organisasi tim koordinasi pembinaan dan pengendalian PPD kabupaten/ kota terdiri dari:

- a. Bupati/Wali kota sebagai penanggung jawab
- b. Sekretariat daerah sebagai pengarah
- c. Kepala Bappeda sebagai anggota pengarah
- d. Kepala Badan/Dinas/ kantor pemberdayaan masyarakat atau nama lainnya sebagai ketua pelaksana
- e. Kepala bidang pada badan/dinas/kantor pemberdayaan masyarakat atau nama lain sebagai sekretaris pelaksanaan
- f. Anggota Tim koodinasi dari unsur:
  1. Sekretaris daerah (bagian keungan daerah)
  2. Bappeda
  3. Dinas PU/kimpraswil
  4. Dinas kesehatan
  5. Dinas pendidikan
  6. Dinas koperasi dan pengembangan UKM
  7. Dinas perdagangan dan perindustrian
  8. Dinas peternakan
  9. Dinas perkebunan
  10. Bank penyaluran yang ditunjuk
  11. Camat lokasi kegiatan PPD.

d. Tingkat provinsi

Gubernur Riau adalah penanggung jawab kegiatan PPD di provinsi, dalam menyelenggarakan kegiatan dibentuk TIM koordinasi pembinaan dan pengendalian PPD tingkat provinsi melalui SK Gubernur Riau. Adapun struktur organisasi tim koordinasi pembinaan dan pengendalian PPD Provinsi Riau terdiri dari:

- a. Gubernur Riau sebagai penanggung jawab
- b. Sekretariat daerah sebagai pengarah
- c. Kepala Babpeda sebagai anggota pengarah
- d. Kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa (Bapemas Bangdes) Provinsi Riau sebagai ketua pelaksana
- e. Kepala bidang pada badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa (Bapemas Bangdes) Provinsi Riau sebagai sekretaris pelaksana
- f. Anggota Tim Koordinasi PPD provinsi dari unsur:
  1. Sekretaris daerah (bagian keuangan daerah)
  2. Bappeda
  3. Dinas PU/kimpraswil
  4. Dinas kesehatan
  5. Dinas pendidikan
  6. Dinas koperasi dan pengembangan UKM
  7. Dinas perdagangan dan perindustrian
  8. Dinas peternakan

9. Dinas perkebunan
10. Bank penyaluran yang ditunjuk.

Sedangkan pengendalian dilakukan melalui monitoring kegiatan program secara bertahap, dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala, dalam rangka mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dari waktu ke waktu atas rencana dengan pelaksanaannya dan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dilapangan selama pelaksanaan. Dalam melakukan monitoring pelaksanaan program supaya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara tahunan.

Sebagai upaya untuk menjamin keberhasilan program PPD, maka dalam penyelenggaraan selain dialokasikan dana usaha desa juga harus didukung dengan penyediaan dana pendamping untuk biaya pembinaan dan administrasi program dari APBD propinsi dan APBD kabupaten/kota sehingga dapat dilakukan koordinasi pembinaan dan pengendalian program secara efektif

DPRD diharapkan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pendistribusian, penggunaan dan efektifitas dari dana yang dianggarkan. Dalam rangka perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dibentuk tim koordinasi pembinaan dan pengendalian yang unsure-unsur, dan wewenagnya di tetapkan melalui surat keputusan Gubernur.



**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**V.1. Deskriptif Variabel**

**V.1.1. Aspek Kapasitas (X1)**

Berdasarkan tanggapan responden tentang item kapasitas yang dominan (paling tinggi) menentukan aspek ini yaitu pengelola UED meminta data mengenai sumber-sumber pendapatan dengan nilai skor 184, dimana yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang (47,62%) dan setuju 18 orang (42,86%). Selanjutnya secara total bahwa aspek kapasitas yang berkategori sangat setuju sebanyak 35,24% dan setuju sebanyak 52,86%.

**Tabel 5.1. Tanggapan Pernyataan Responden Mengenai Aspek Kapasitas (X<sub>1</sub>)**

No.	Pernyataan	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1	Jlh Res	Skor
1.	Dalam Proses Pengambilan keputusan Pemberian Kredit perlu meminta data pendapatan perbulan.	15	25	1	1	0	42	180
2.	Pengelola UED meminta data mengenai sumber-sumber pendapatan.	20	18	4	0	0	42	184
3.	Pendapatan dan pengeluaran belanja diperhatikan oleh pengelola	18	18	5	1	0	42	179
4.	Dengan jumlah tanggungan yang saya biayai saat ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar angsuran kredit.	10	25	6	1	0	42	170

No.	Pernyataan	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1	Jlh Res	Skor
-----	------------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	------

5.	Penghasilan dari pekerjaan sampingan (tambahan) yang diperoleh setiap bulannya dapat membantu dalam pembayaran angsuran kredit.	11	25	6	0	0	42	173
Total Skor		74	111	22	3	0	210	886
Persentase		35.24	52.86	10.48	1.43	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Primer

### V.1.2.Aspek Karakter (X<sub>2</sub>)

Berdasarkan tanggapan tentang item karakter yang dominan (paling tinggi) menentukan aspek ini yaitu responden memiliki reputasi yang tinggi dilingkungan usahanya dengan nilai skor 182, dimana yang menyatakan sangat setuju sebanyak 17 orang (40,48%) dan setuju 22 orang (47,62%). Selanjutnya secara total bahwa aspek karakter yang berkategori sangat setuju sebanyak 24,60% dan setuju sebanyak 47,62%.

**Tabel 5.2. Tanggapan Pernyataan Responden Mengenai Aspek Karakteristik (X<sub>2</sub>)**

No.	Pernyataan	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1	Jlh Res	Skor
1.	Pihak pengelola meminta Keterangan tentang aktivitas sehari-hari.	10	16	9	7	0	42	155
2.	Pihak pengelola berusaha mengenal lebih dekat dengan meminta informasi kepada rekan atau tetangga.	6	16	9	11	0	42	143
No.	Pernyataan	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1	Jlh Res	Skor
3.	Pihak pengelola meminta pendapat dari rekan atau masukan dari teman.	10	20	8	4	0	42	162

4.	Pihak pengelola yakin dengan itikad baik.	10	26	4	2	0	42	170
5.	Merasa gaya hidup sangat sederhana.	9	19	9	5	0	42	158
6.	Memiliki reputasi yang tinggi dilingkungan usahanya.	17	22	3	0	0	42	182
Total Skor		62	119	42	29	0	252	970
Persentase		24.60	47.22	16.67	11.51	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Primer

### V.1.3.Aspek Jaminan (X<sub>3</sub>)

Berdasarkan tanggapan tentang item jaminan yang dominan (paling tinggi) menentukan aspek ini yaitu pihak pengelola mengerti dan memahami kemampuan dalam melakukan kewajiban dengan nilai skor 185, dimana yang menyatakan sangat setuju sebanyak 21 orang (50%) dan setuju 17 orang (40,48%). Selanjutnya secara total bahwa aspek jaminan yang berkategori sangat setuju sebanyak 39,05% dan setuju sebanyak 50,48%.

**Tabel 5.3. Tanggapan Pernyataan Responden Mengenai Aspek Jaminan (X<sub>3</sub>)**

No.	Pernyataan	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1	Jlh Res	Skor
1.	Dalam Proses Pengambilan keputusan Pemberian Kredit, pihak pengelola (lebih mengutamakan jaminan sebagai persyaratan utama.	10	28	3	1	0	42	173
No.	Pernyataan	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1	Jlh Res	Skor
2.	Pihak pengelola yakin dengan jaminan yang berikan, yakni keyakinan pengelola atas usaha/pekerjaan.	16	24	1	1	0	42	181
3.	Pihak pengelola mengerti dan	21	17	4	0	0	42	185

	memahami kemampuan dalam melakukan kewajiban.							
4.	Keberadaan jaminan calon debitur harus jelas dan dapat disurvei oleh pihak bank.	19	17	5	1	0	42	180
5.	Menilai jual bila barang jaminan dijadikan uang dari calon nasabah cukup menunjang dalam melakukan pinjaman.	16	20	6	0	0	42	178
Total Skor		82	106	19	3	0	210	897
Persentase		39.05	50.48	9.05	1.43	0.00	100	

Sumber : Data Olahan Primer

#### V.1.4 . Pemberian Kredit (Y)

Berdasarkan tanggapan tentang item pemberian kredit yang dominan (paling tinggi) menentukan aspek ini yaitu pihak pengelola dalam pemberian kredit sangat memperhatikan kemampuan keuangan dengan nilai skor 172, dimana yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang (38,10%) dan setuju 19 orang (45,24%). Selanjutnya secara total bahwa aspek pemberian kredit yang berkategori sangat setuju sebanyak 27,38% dan setuju sebanyak 51,19%.

**Tabel 5.4. Tanggapan Pernyataan Responden Mengenai Pemberian Kredit (Y)**

No.	Pernyataan	SS 5	S 4	RR 3	TS 2	STS 1	Jlh Res	Skor
1.	Pihak pengelola dalam pemberian kredit sangat memperhatikan kemampuan keuangan.	16	19	2	5	0	42	172
2.	Pihak pengelola dalam memberikan	15	17	7	3	0	42	170

	kredit sudah memahami karakter.							
3.	Pihak pengelola dalam memberikan kredit sudah menilai usaha/pekerjaan.	8	27	6	1	0	42	168
4.	Pihak pengelola dalam memberikan kredit selalu bertindak hati-hati dan memegang kaidah dalam pemberian kredit kepada debitur.	7	23	8	4	0	42	159
Total Skor		46	86	23	13	0	168	669
Persentase		27.38	51.19	13.69	7.74	0.00	100.00	

Sumber : Data Olahan Primer

## V.2. Uji Kualitas Data

### V.2.1. Aspek Kapasitas

Berdasarkan pengukuran reliabilitas dan validitas dari indikator variabel yang terdiri 5 item pertanyaan tentang aspek kapasitas. Hasil pengujian reliabilitas nilai *alpha cronbach* sebesar 0,782 lebih besar dari 0,60. Kemudian pengujian validitas 5 pernyataan tersebut terlihat pada *correlated itemtotalcorrelation* adalah valid, masing-masing item pertanyaan dari suatu variabel dapat dilihat kevalidannya dari *Corrected Item-Total Correlation* yang memiliki nilai > dari 0,3 (Sugiyono, 2002) seperti pertanyaan item tentang dalam Proses Pengambilan keputusan Pemberian Kredit perlu meminta data pendapatan perbulan dengan nilai *correlated item-total correlation* sebesar 0,414.

**Tabel 5.5. Hasil Uji Validitas Variabel Aspek Kapasitas**

No	Item Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>
1	Dalam Proses Pengambilan keputusan Pemberian Kredit perlu meminta data pendapatan perbulan.	0,414
2	Pengelola UED meminta data mengenai sumber-sumber pendapatan.	0,505

3	Pendapatan dan pengeluaran belanja diperhatikan oleh pengelola	0,749
4	Dengan jumlah tanggungan yang saya biayai saat ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar angsuran kredit.	0,569
5	Penghasilan dari pekerjaan sampingan (tambahan) yang peroleh setiap bulannya dapat membantu dalam pembayaran angsuran kredit.	0,559

Sumber: Hasil Pengolahan Program SPSS

### V.2.2. Aspek Karakteristik

Berdasarkan pengukuran reliabilitas dan validitas dari indikator variabel yang terdiri 6 item pertanyaan tentang aspek karakteristik. Hasil pengujian reliabilitas nilai *alpha cronbach* sebesar 0,757 lebih besar dari 0,60. Kemudian pengujian validitas tersebut terlihat pada *correlated item totalcorrelation* adalah valid, masing-masing item pertanyaan dari suatu variabel dapat dilihat kevalidannya dari *Corrected Item-Total Correlation* yang memiliki nilai > dari 0,3, seperti pertanyaan item tentang dalam Pihak pengelola meminta Keterangan tentang aktivitas sehari-hari dengan nilai *correlated item-total correlation* sebesar 0,561.

**Tabel 5.6. Hasil Uji Validitas Variabel Aspek Karakter**

No	Item Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>
1	Pihak pengelola meminta Keterangan tentang aktivitas sehari-hari.	0,561
2	Pihak pengelola berusaha mengenal lebih dekat dengan meminta informasi kepada rekan atau tetangga.	0,698
3	Pihak pengelola meminta pendapat dari rekan atau masukan dari teman.	0,525
4	Pihak pengelola yakin dengan itikad baik.	0,496
5	Merasa gaya hidup sangat sederhana.	0,517
6	Memiliki reputasi yang tinggi dilingkungan usahanya.	0,379

Sumber: Hasil Pengolahan Program SPSS

### V.2.3. Aspek Jaminan

Berdasarkan pengukuran reliabilitas dan validitas dari indikator variabel yang terdiri 5 item pertanyaan tentang aspek jaminan. Hasil pengujian reliabilitas nilai *alpha cronbach* sebesar 0,755 lebih besar dari 0,60. Kemudian pengujian validitas tersebut terlihat pada *correlated item totalcorrelation* adalah valid, masing-masing item pertanyaan dari suatu variabel dapat dilihat kevalidannya dari *Corrected Item-Total Correlation* yang memiliki nilai > dari 0,3, seperti pertanyaan item tentang dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pihak pengelola (lebih mengutamakan jaminan sebagai persyaratan utama dengan nilai *correlated item-total correlation* sebesar 0,379.

**Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas Variabel Aspek Jaminan**

No	Item Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>
1	Dalam Proses Pengambilan keputusan Pemberian Kredit, pihak pengelola (lebih mengutamakan jaminan sebagai persyaratan utama.	0,379

No	Item Pertanyaan	<b>Corrected Item-Total Correlation</b>
2	Pihak pengelola yakin dengan jaminan yang berikan, yakni keyakinan pengelola atas usaha/pekerjaan.	0,425
3	Pihak pengelola mengerti dan memahami kemampuan dalam melakukan kewajiban.	0,730
4	Keberadaan jaminan calon debitur harus jelas dan dapat disurvei oleh pihak bank.	0,467
5	Menilai jual bila barang jaminan dijadikan uang dari calon nasabah cukup menunjang dalam melakukan pinjaman.	0,637

Sumber: Hasil Pengolahan Program SPSS

#### **V.2.4. Pemberian Kredit**

Berdasarkan pengukuran reliabilitas dan validitas dari indikator variabel yang terdiri 4 item pertanyaan tentang pemberian kredit. Hasil pengujian reliabilitas nilai *alpha cronbach* sebesar 0,617 lebih besar dari 0,60. Kemudian pengujian validitas tersebut terlihat pada

*correlated item total correlation* adalah valid, masing-masing item pertanyaan dari suatu variabel dapat dilihat kevalidannya dari *Corrected Item-Total Correlation* yang memiliki nilai > dari 0,3, seperti pertanyaan item tentang pihak pengelola dalam pemberian kredit sangat memperhatikan kemampuan keuangan dengan nilai *correlated item-total correlation* sebesar 0,331.

**Tabel 5.8. Hasil Uji Validitas Variabel Pemberian Kredit**

No	Item Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>
1	Pihak pengelola dalam pemberian kredit sangat memperhatikan kemampuan keuangan.	0,331
2	Pihak pengelola dalam memberikan kredit sudah memahami karakter.	0,462
3	Pihak pengelola dalam memberikan kredit sudah menilai usaha/pekerjaan.	0,369
4	Pihak pengelola dalam memberikan kredit selalu bertindak hati-hati dan memegang kaidah dalam pemberian kredit kepada debitur.	0,451

Sumber: Hasil Pengolahan Program SPSS

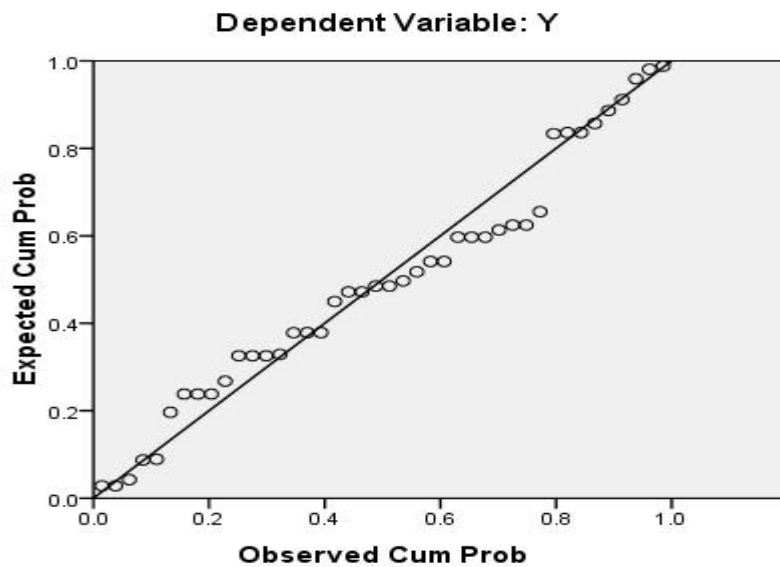
### V.3. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada penelitian ini, variabel dependen dan independen berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.1, penyebaran datanya berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya.

**Gambar 5.1. Uji Normalitas**



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**V.4. Asumsi Klasik**

**V.4.1. Uji Autokorelasi**

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin-Watson dengan ketentuan:

- a. Jika DW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif
- b. Jika DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi
- c. Jika DW diatas +2, berarti autokorelasi negatif

**Tabel 5.9. Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 <sup>a</sup>	.948	.944	.13677	1.058

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

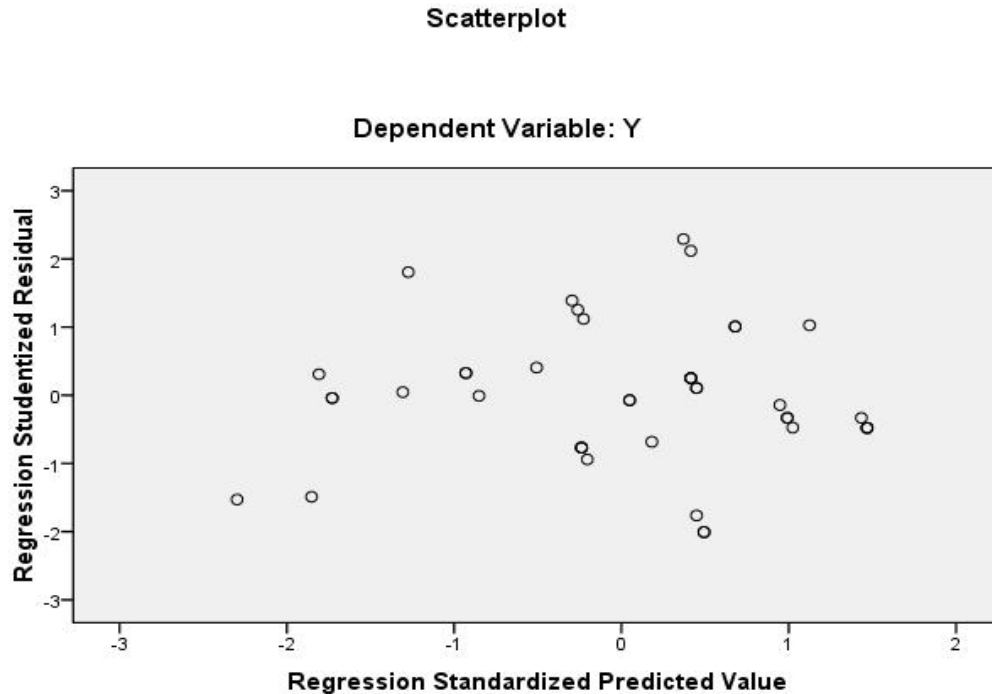
Dari tabel diatas terlihat bahwa angka Durbin-Watson dibawah 2 yaitu sebesar 1,058 yang berarti tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi ini bebas dari autokorelasi.

#### **V.4.2. Uji Heteroskedastisitas**

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik *scatterplot*. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola tertentu pada grafik dimana sumbu X dan sumbu Y menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Santoso:2001).

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### **Gambar 5.2. Diagram Scatterplot Heteroskedastisitas**



### V.4.3. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antarvariabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal, artinya bahwa variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk melihat adanya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi parsial variabel-variabel bebasnya melalui metric korelasi, bila korelasinya signifikan maka antar variabel bebas tersebut terjadi multikolinieritas.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan melihat nilai VIF dengan formula  $VIF = \frac{1}{1 - R^2}$

dimana  $VIF = \frac{1}{Toleransi}$  pendapatan (X1) sebesar 4,922; karakteristik (X2) sebesar 1,232 dan jaminan (X3) sebesar 5,345 sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) variabel bebas tersebut tidak terdapat multikolinearitas karena nilai VIF nya lebih kecil dari 10.

**Tabel 5.10. Hasil Multikolinieritas Menggunakan VIF**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X <sub>1</sub>	0,203	4,922
X <sub>2</sub>	0,812	1,232
X <sub>3</sub>	0,187	5,345

Sumber : Hasil Kuesioner

## V.5. Analisis Regresi

Berdasarkan distribusi tanggapan responden menurut perolehan skor untuk variabel-variabel sebagaimana yang telah diuraikan di atas bermanfaat untuk memberikan informasi pendahuluan mengenai besarnya persentase kategori dari tanggapan mereka.

Namun demikian, hasil dari skor tersebut belum dapat dipergunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan tentang faktor-faktor mempengaruhi perilaku pelanggan terhadap keputusan membeli. Untuk mendapat kesimpulan yang valid, maka perlu dilakukan serangkaian pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda yang diuraikan sebagai berikut :

### V.5.1. Pengaruh Secara Simultan

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai  $R^2 = 0,948$  menunjukkan secara simultan kapasitas, karakter dan jaminan terhadap pemberian kredit sebesar 94,80% dan sisanya 5,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya, uji F hitung sebesar 233.236 dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,000 lebih kecil daripada 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian berarti pendapatan, karakter dan jaminan terhadap pemberian kredit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan.

### **V.5.2. Pengaruh Secara Parsial**

Pengujian analisis regresi linear berganda berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -1,093 + 0,972X_1 + 0,114 X_2 + 0,125 X_3$$

1. Konstanta sebesar negatif 1,093 menyatakan bahwa berarti kapasitas, karakter dan jaminan dalam keadaan tetap (konstan) maka pemberian kredit turun sebesar 1,093 satuan.
2. Koefisien regresi kapasitas ( $X_1$ ) sebesar 0,972 ini artinya terdapat pengaruh positif dan jika ditingkat sebesar 100% apabila karakter dan jaminan dalam keadaan konstan (tetap) maka pemberian kredit meningkat sebesar 97,20%.
3. Koefisien regresi karakter ( $X_2$ ) sebesar 0,114 ini artinya terdapat pengaruh positif dan jika ditingkat sebesar 100% apabila pendapatan dan jaminan dalam keadaan konstan (tetap) maka pemberian kredit meningkat sebesar 11,40%.
4. Koefisien regresi jaminan ( $X_3$ ) sebesar 0,125 ini artinya terdapat pengaruh positif dan jika ditingkat sebesar 100% apabila pendapatan dan karakter dalam keadaan konstan (tetap) maka keputusan membeli meningkat sebesar 12,50%.

Selanjutnya, dapat pula di uji tingkat signifikansi dari setiap variabel bebas terhadap keputusan membeli, sebagai berikut :

1. Nilai t-hitung kapasitas ( $X_1$ ) sebesar 10,200 dengan signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05 ini artinya  $H_a =$  ditolak dan  $H_o =$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendapatan terhadap pemberian kredit adalah signifikan.
2. Nilai t-hitung karakter ( $X_2$ ) sebesar 2,872 dengan signifikan 0,007 lebih kecil daripada 0,05 ini artinya  $H_a =$  diterima dan  $H_o =$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh karakter terhadap pemberian kredit adalah signifikan.
3. Nilai t-hitung jaminan ( $X_3$ ) sebesar 1,232 dengan signifikan 0,226 lebih besar daripada 0,05 ini artinya  $H_a =$  ditolak dan  $H_o =$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh jaminan terhadap pemberian kredit adalah tidak signifikan.

Berdasarkan ketiga variabel bebas tersebut maka faktor yang dominan mempengaruhi pemberian kredit adalah kapasitas. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang paling besar dan nilai uji t-hitungnya. Oleh sebab itu dalam pemberian kredit kepada nasabah, harus berdasarkan penilaian yang tepat dan pada tingkat pendapatan mereka. Namun perlu juga diperhatikan faktor yang lain karena waktu penyelesaian pengembalian kredit tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kerugian kepada pihak yang memberi kredit.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada nasabah UED Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah responden 42 orang, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai  $R^2 = 0,948$  menunjukkan secara simultan kapasitas, karakter dan jaminan terhadap pemberian kredit sebesar 94,80% dan sisanya 5,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. uji F hitung sebesar 233.236 dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 0,000 lebih kecil daripada 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian berarti kapasitas, karakter dan jaminan terhadap pemberian kredit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan.
2. Koefisien regresi karakter ( $X_2$ ) sebesar 0,114 ini artinya terdapat pengaruh positif dan jika ditingkat sebesar 100% apabila pendapatan dan jaminan dalam keadaan konstan (tetap) maka pemberian kredit meningkat sebesar 11,40%. Nilai t-hitung karakter ( $X_2$ ) sebesar 2,872 dengan signifikan 0,007 lebih kecil daripada 0,05 ini artinya  $H_a =$  diterima dan  $H_0 =$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh karakter terhadap pemberian kredit adalah signifikan.
3. Koefisien regresi jaminan ( $X_3$ ) sebesar 0,125 ini artinya terdapat pengaruh positif dan jika ditingkat sebesar 100% apabila pendapatan dan karakter dalam keadaan konstan (tetap) maka keputusan membeli meningkat sebesar 12,50%. Nilai t-hitung jaminan ( $X_3$ ) sebesar

1,232 dengan signifikan 0,226 lebih besar daripada 0,05 ini artinya  $H_a =$  ditolak dan  $H_o =$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh jaminan terhadap pemberian kredit adalah tidak signifikan.

## **VI.2. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang dikemukakan maka ada beberapa saran sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, agar menggunakan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi tunggakan kredit untuk lebih mengembangkan wawasan
2. Bagi unit simpan pinjam UED hendaklah memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyaluran kredit sebelum memberikan pinjaman pada nasabah.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesalahan unit, kesalahan nasabah, dan kesalahan faktor ekonomi, sangat mempengaruhi terjadinya tunggakan kredit pada Unit Simpan pinjam UED di Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu, oleh karena itu Unit Simpan Pinjam UED harus memperhatikan faktor-faktor tersebut sebelum memberikan pinjaman pada calon nasabah.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Dalam perekonomian yang dihadapi dan sedang dijalankan pada saat ini, ada sekelompok kecil masyarakat dalam kedudukan ekonomi yang kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional. Sedangkan di pihak lain sebagian masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di Negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai salah satu problema, karena masalah kemiskinan menuntut adanya suatu pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh.

Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir intekralasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Disamping problema klasik mengenai kekurangan kebutuhan dasar, dimensi kemiskinan juga menyangkut problema ketidakberdayaan dan ketidaklibatan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan, serta problem kerentanan dan kerawanan terhadap resiko-resiko diluar dirinya.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa/kelurahan guna merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Pemanfaatan dana usaha desa atau kelurahan harus memperhatikan potensi sumber daya alam desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah sedikitnya telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan tersebut hanya dinikmati golongan-golongan tertentu atau segolongan (konglomerat) sedangkan yang lainnya hanya menikmati sedikit saja pembangunan nasional yang tersisa.

Berpijak pada kenyataan tersebut, maka muncullah gagasan-gagasan dan pemikiran baru untuk mengoreksi kebijaksanaan masa lalu namun tetap meneruskan kesinambungan pembangunan yang sudah ada serta mengantisipasi dan menghindari kesenjangan yang semakin lebar antara berbagai potensi pembangunan di tanah air. Koreksi kebijakan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerat ini kemudian diterjemahkan dengan program ekonomi yang bertumpu dan berbasis masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau nomor 78 Tahun 2009 dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka pemerintah Propinsi Riau telah melaksanakan program pemberdayaan desa yang menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya mengacu kepada pedoman umum dan petunjuk teknis program pemberdayaan desa. Salah satu program tersebut adalah bantuan pinjaman kepada masyarakat melalui dengan program usaha ekonomi simpan pinjam (UED).

Untuk menjangkau lapisan masyarakat sampai paling bawah, maka badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa nampaknya merupakan pilihan yang cukup tepat. Melalui UED-SP ini, masyarakat sangat terbantu dan memberi peluang tentunya bermanfaat bagi masyarakat karena dapat mengembangkan atau membuka usaha baru mereka.

Salah satu UED yang ada di Propinsi Riau diantaranya UED Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu yang telah melaksanakan program pemerintah tersebut. Kegiatan ini mewujudkan visi dan misi Kabupaten dan sekaligus Propinsi Riau yaitu meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan desa.

**Tabel 1.1. Jumlah Pinjaman Program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED) Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu**

No	Periode	Jumlah Pinjaman	
		Dalam Rupiah	Orang
1	Desember 2010	38.100.000	5
2	Maret 2011	69.850.000	7
3	Mei 2011	58.970.000	7
4	Juni 2011	60.960.000	6
5	Juli 2011	66.040.000	8
6	Agustus 2011	50.800.000	7
7	Oktober 2011	54.610.000	7
8	Nopember 2011	38.100.000	4
9	Desember 2011	66.675.000	8
10	Pembruari 2012	54.160.000	6
11	April 2012	67.680.000	6
Total		625.945.000	71

Sumber : UED Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan pada Tabel 1 tersebut terlihat bahwa dari periode Desember 2010 hingga April 2012 total pinjaman sebesar Rp. 625.945.000,-. Hal ini juga terlihat masyarakat meminjam dana kepada UED tidak setiap periode atau bulan. Adapun jumlah pinjaman tertinggi adalah pada periode Maret 2011 berjumlah Rp. 69.850.000,- sedangkan yang terendah Desember 2010 dan Nopember 2011 berjumlah Rp. 38.100.000,-.

Dana usaha desa disediakan pemerintah Propinsi Riau dan pemeintah kabupaten/kota se-Propinsi Riau dalam APBD masing-masing dan kerja sama dengan BRI untuk pertama kali dimulai pada tahun 2005 untuk desa / kelurahan dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan desa propinsi Riau yang bertujuan untuk mendorong: kegiatan prekonomian,

meningkatkan kegiatan berusaha masyarakat berpenghasilan rendah, menghindarkan masyarakat dari praktek ijon, mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana, serta meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib bagi masyarakat.

Kredit yang diberikan kepada masyarakat berupa verifikasi seperti tempat usaha, kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan dalam proposal, kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha, kebenaran dan nilai agunan yang diajukan (jaminan), kapasitas usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman (pendapatan), dan karakter calon kreditur.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengungkapkan permasalahan mengenai pengaruh *capacity*, *character* (watak) dan *collateral* (jaminan) dalam pemberian kredit UED yang telah dilakukan oleh Bina Usaha Desa boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH KAPASITAS, KARAKTER DAN JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI DESA (UED) BINA USAHA DESA BONCAH TERGENANG KABUPATEN ROKAN HULU”**.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh kapasitas, karakter, dan jaminan terhadap pemberian kredit pada UED Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu?
2. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi pemberian kredit pada UED Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu?

### **I.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas, karakter, dan jaminan secara simultan terhadap pemberian kredit pada UED Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas, karakter, dan jaminan secara partial terhadap pemberian kredit pada UED Bina Usaha Desa Boncah Tergenang Kabupaten Rokan Hulu.

### **I.4.Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai informasi/saran bagi pihak Desa terutama yang menangani UED-Bina Usaha untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan usaha simpan-pinjam desa tersebut
- b. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam bidang ekonomi khususnya manajemen keuangan
- c. Sebagai pedoman bagi pihak yang membutuhkan terutama bagi yang ingin melakukan penelitian.

### **I.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II: TELAAH PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung penelitian, terutama mengenai analisis pemberian kredit, penelitian sebelumnya

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yang berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisis data.

**BAB IV: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat UED, dan aktivitas perusahaan.

**BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi UED.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aris Riyadi, 2000, “*Peranan laporan Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja*”, skripsi tidak dipublikasikan, UMS, Surakarta
- Dendawijaya, Lukman, 2005, *Manajemen perbankan*, edisi kedua, ghalia Indonesia, bogor.  
dipublikasikan, UNS, Surakarta
- Dwi Permanahayati, 2001, “*Peranan Laporan Keuangan Calon Debitur Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja*”, skripsi tidak
- Eni Susilawati, 2000, “*Peranan Laporan Keuangan Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*”, skripsi tidak dipublikasikan, UNISRI, Surakarta
- Farid Tribune Uniqueu, 2007, *Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor Pada Debitur PT. Wom Finance Surakarta*, skripsi tidak dipublikasikan, UNS
- Fauziah, 2001,, “*Persepsi Nasabah Terhadap Peranan Laporan Keuangan Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja*”, skripsi tidak dipublikasikan, UNS, Surakarta
- Hasibuan, Malayu, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Husein, Umar. 2005. *Studi Kelayakan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Jumingan, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2011, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali pers, Jakarta
- Lukman, Syamsudin, 2007, *Manajemen keuangan perusahaan*, PT. Rajagrafindo, Jakarta
- Mahmoedin, 2002, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mulyana Teguh, Pudjo 2001, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPFE, Yogyakarta.
- Naja, H.R.Daeng, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra aditya bakti, Bandung
- Natar , Adri, dan Nurbekti Satrio, 2008, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Kredit, Plus*, Jakarta.

Puspoprano, Sawaldjo, 2004, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

Rahmat, Firdaus, dan Maya, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta Bandung

Rivai, Veithzal dan anria permata veithzal, 2006, *Credit Management Hand Book*, PT. rajaGrapindo persada, Jakarta

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Supramono, Gatot, 2009 *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta  
Surakarta

Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung

Yusuf Prih Pudiyanto, 2002, “*Analisis Laporan Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kedit Modal Kerja*”, skripsi tidak dipublikasikan, UNS,

Zainul, Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang Dan Prospek Bank Syariah*, Alfabeta, Jakarta